

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan (Kiranayanti, dkk., 2016). Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat yang akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siwambudi, dkk., 2017).

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D., 2016).

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan

berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya (Nurcholis, 2011:42).

Selain itu pemerintah dituntut untuk memberikan laporan keuangan sesuai dalam undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mewajibkan pemerintah memberikan informasi mengenai kinerja badan publik diantaranya yaitu mengenai laporan keuangan yang benar, akurat dan tidak menyesatkan (Dito Aditia, 2019:1). Informasi ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerjanya (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadani, 2014:5).

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pujanira, P., & Taman, A., 2017). Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik (Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D., 2016).

Laporan keuangan daerah yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus akuntabel, serta bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K., 2020). Laporan keuangan haruslah mampu memberikan informasi/data yang diperlukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah sebagai aparat yang dipercayai oleh rakyat dalam pengelolaan

keuangan negara dan masyarakat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara dan rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya (Novaria, R., Popi, F., & Mukhlizul, H., 2020).

Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah perlu dilakukan audit dan pemeriksaan oleh badan atau instansi yang berwenang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan badan yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dan mengeluarkan opini atas hasil audit tersebut (Supadmi, N. L., & Supadmi, N. L., 2020).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Riandani, R., 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK RI dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N., 2017).

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia (SDM), sebab daerah yang masih mendapatkan opini WDP seringkali

kekurangan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi . SDM adalah salah satu faktor pendukung dalam kesuksesan penyusunan laporan keuangan, namun kesuksesan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh SDM saja melainkan didukung juga oleh kompetensi yang dimilikinya dalam bidang akuntansi (Listiyani, S., & Gunawan, A., 2020). Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan (Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D., 2017).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya (Pramudityo, B., & Trisnawati, R., 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. (Tawaqal, I., & Suparno, S., 2017).

Orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul akan menempatkan posisi Kompetensi yang baik. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kinerja yang di alaminya. kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi seberapa bagus kualitas laporan keuangan daerah. semakin bagus kompetensi sumber daya

manusia nya semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Utama, R. J., Tanjung, A. R., & Sofyan, A., 2017). kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintah sangat diperlukan untuk pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana yang disebutkan Rovieyanti bahwa dalam melaksanakan tugas dengan profesional, efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kompetensi bidang dan kompetensi dasar (Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E., 2017).

Selain faktor kompetensi sumber daya manusia Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek (Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R., 2017).

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu (Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018).

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan

Daerah, dan menyalurkan Keuangan Daerah kepada pelayanan publik agar proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat terselenggara (Ismail, I., 2017).

Adapun Manfaat dari penggunaan teknologi informasi yaitu mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan multiprocesing (Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D., 2017).

Maka dari itu Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A., 2016). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Sebanyak 24 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menyanggah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun tiga (3) Pemerintahan lainnya, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI (Ddy., 2019)

Pemkab Bandung Barat (KBB), Jawa Barat kembali gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan pemeriksaan kinerja BPK, RSUD lembang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Seperti diketahui, kasus korupsi dana BPJS senilai Rp7,7 miliar di RSUD Lembang menjadi perhatian khusus BPK saat menyambangi instansi tersebut (Ayi Kusmawan., 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”** (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Bandung Barat).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara tidak efisien.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi masih kurang.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK karena tindakan *Fraud*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Seberapa besar Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit Analisis dalam penelitian adalah BPKD Kabupaten Bandung Barat.

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini *relative* kecil yakni kurang dari 100 responden dikarenakan kesulitan memperoleh data.
3. Kuesioner disebarakan secara *online* melalui teknologi *Google Form* untuk memudahkan dalam memperoleh data responden.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penerlitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan melalui pembuktian bagaimana Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Adapun kegunaan penelitian dalam aspek akademis ialah sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat dijadikan sebagai pembuktian kembali atas teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Kompentensi

Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan teknis analisis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang permasalahan yang terjadi pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait permasalahan tersebut.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian khususnya pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.